

## Evaluasi Pengelolaan Aset Publik untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Kota Serang Provinsi Banten

Hasyim Adnan

Prodi Administrasi Negara STISIP Banten Raya, Pandeglang, Indonesia

[joadnan@gmail.com](mailto:joadnan@gmail.com)

Corresponding author: [joadnan@gmail.com](mailto:joadnan@gmail.com)

Submitted: 22/07/2025; Revised: 14/08/2025; Published: 19/08/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.370>

### Abstract

*This study aims to evaluate the management of public assets in Serang City and its contribution to the achievement of sustainable development. Public assets, such as land, buildings, and infrastructure, serve as strategic resources in supporting economic, social, and environmental programs. Effective and optimal asset management not only enhances public service efficiency but also contributes to long-term community welfare and environmental sustainability. The findings reveal that Serang City faces several challenges in managing public assets, including the absence of an integrated data system, inadequate maintenance mechanisms, and limited utilization of assets for productive activities. Furthermore, institutional coordination and budget allocation for asset management remain suboptimal. Despite these challenges, the study identifies potential opportunities for improvement, such as the digitalization of asset management systems, reinforcement of regulatory frameworks, and capacity-building for human resources. Involving local communities in asset monitoring and utilization is also highlighted as a strategic recommendation to ensure transparency and accountability. With better governance, Serang City has the potential to accelerate the achievement of sustainable development goals, particularly in promoting inclusive economic growth, enhancing social welfare, and preserving the environment. The study concludes that strengthening asset management is a critical step toward ensuring that public resources are managed effectively for the benefit of present and future generations.*

**Keywords:** *Public Asset Management, Sustainable Development, Evaluation, Serang City*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan aset publik di Kota Serang serta kontribusinya terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Aset publik, seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur, memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan aset yang efektif dan optimal tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset publik di Kota Serang masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum adanya sistem data terintegrasi, lemahnya mekanisme pemeliharaan, serta rendahnya pemanfaatan aset untuk kegiatan produktif. Selain itu, koordinasi antarinstansi pemerintah dan alokasi anggaran untuk pengelolaan aset juga belum optimal. Meski demikian, penelitian ini

menemukan sejumlah peluang perbaikan, seperti digitalisasi sistem pengelolaan aset, penguatan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pemanfaatan aset juga direkomendasikan sebagai langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan tata kelola yang lebih baik, Kota Serang berpotensi mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengelolaan aset publik merupakan langkah penting untuk memastikan sumber daya publik dikelola secara efektif bagi generasi kini dan mendatang.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Aset Publik, Pembangunan Berkelanjutan, Evaluasi, Kota Serang

## **Pendahuluan**

Pengelolaan aset publik memiliki kedudukan yang sangat berarti dalam menunjang keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan berkepanjangan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, serta daerah. Aset publik, semacam tanah, bangunan, serta infrastruktur, ialah sumber energi strategis yang wajib dikelola secara efisien serta efektif buat membagikan manfaat optimal untuk penduduk. Di Kota Serang, aset- aset ini memainkan kedudukan berarti dalam mendukung pelayanan publik, mendesak perkembangan ekonomi lokal, serta menghasilkan penyeimbang daerah. Aset wilayah pula ialah seluruh kekayaan wilayah yang dipunyai ataupun yang dipahami pemerintah wilayah, yang dibeli ataupun diperoleh atas beban APBD ataupun berasal dari perolehan yang lain yang legal, misalnya sumbangan, hadiah, kontribusi, waqaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, serta sebagainya (Setiabudhi, 2019) . Tetapi, pengelolaan peninggalan publik kerap kali mengalami bermacam tantangan, semacam minimnya pemeliharaan, sedikitnya sistem pendataan yang terintegrasi, dan rendahnya tingkatan pemanfaatan peninggalan buat aktivitas produktif. Keadaan ini tidak cuma membatasi optimalisasi pemanfaatan peninggalan publik namun pula berpotensi merendahkan energi saing Kota Serang dalam menggapai tujuan pembangunan berkepanjangan. Tidak hanya itu, koordinasi antarinstansi yang belum optimal serta keterbatasan alokasi anggaran jadi gangguan ekstra dalam proses pengelolaan aset. Sehingga di perlukannya manajemen aset yang mengaitkan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, serta pengelolaan pemakaian aset secara maksimal buat menggapai tujuan bisnis industri (Sudarta, 2022).

Oleh sebab itu, dibutuhkan penilaian yang komprehensif terhadap sistem pengelolaan aset publik di Kota Serang guna mengenali kasus, kesempatan, serta langkah strategis yang bisa dicoba. Penilaian ini tidak cuma bertujuan buat tingkatan daya guna pengelolaan namun pula membenarkan kalau aset publik bisa menunjang keberlanjutan pembangunan di kota serang pada bermacam zona. Seperti apa yang di katakan(Sonia & Handrian, 2023). kalau mengevaluasi pada dasarnya ialah suatu seni tertentu. Didalam proses penerapan penilaian terlebih dulu wajib memastikan apa yang wajib di ukur, menetapkan standar kinerja, melaksanakan pengukuran serta apabila tidak cocok dengan harapan, hingga melaksanakan aksi koreksi. Sehingga riset ini diharapkan bisa membagikan saran strategis yang relevan, semacam digitalisasi sistem manajemen peninggalan, penguatan regulasi, serta pelibatan warga dalam proses pengelolaan. Dengan pengelolaan aset publik yang lebih baik, Kota Serang bisa memusatkan pencapaian tujuan pembangunan berkepanjangan yang mencakup perkembangan ekonomi inklusif, kenaikan mutu hidup warga, serta pelestarian daerah. Hingga perlu penekanan utama ialah pembangunan yang melindungi kenaikan kesejahteraan ekonomi warga secara berkelanjutan, pembangunan yang melindungi keberlangsungan kehidupan sosial warga, pembangunan yang melindungi mutu daerah hidup dan peningkatan yang menjamin keadilan serta optimalisasi tata kelola yang sanggup melindungi kenaikan mutu hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Rustam et al., 2023).

## **Tinjauan Pustaka**

### **1) Konsep dan Ruang Lingkup Aset Publik**

Aset publik mencakup tanah, bangunan, infrastruktur (jalan, air bersih, drainase), peralatan, dan aset tak berwujud yang dikelola pemerintah untuk layanan publik. Literatur internasional menekankan bahwa pengelolaan aset (asset management) adalah proses siklus hidup-dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga pemindahtanganan-yang harus selaras dengan sasaran organisasi dan menghasilkan nilai publik. Standar ISO 55000 merumuskan prinsip, istilah, dan kerangka

sistem manajemen aset yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan penganggaran jangka panjang.

## **2) Kerangka Regulasi Indonesia**

Di Indonesia, tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) diatur oleh PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD yang telah diubah dengan PP No. 28/2020. Regulasi ini menegaskan proses siklus hidup BMD, peran pengelola barang, dan skema pemanfaatan hingga pemindahtanganan. Pedoman operasionalnya termuat dalam Permendagri No. 19/2016 (dan perubahannya pada Permendagri No. 7/2024). Bagi pemerintah daerah, ini menjadi dasar legal untuk perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan ekonomi, pengamanan, pengawasan, serta penghapusan.

## **3) Pengelolaan Aset untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

Pengelolaan aset publik berkontribusi langsung pada SDG 9 (infrastruktur), SDG 11 (kota berkelanjutan), SDG 12 (konsumsi/produksi berkelanjutan), dan SDG 13 (aksi iklim). Panduan PBB menekankan rencana manajemen aset infrastruktur yang memasukkan ketahanan, keberlanjutan, dan layanan esensial—terutama untuk air, sanitasi, transportasi, dan ruang publik—serta kebutuhan penguatan kapasitas daerah. Di Indonesia, hal ini dipayungi oleh RAN SDGs 2021–2024 dan inisiatif lokalisasi SDGs (kolaborasi pemerintah pusat–daerah).

## **4) Prinsip Tata Kelola & Nilai untuk Uang (VfM)**

Evaluasi pengelolaan aset publik lazim memakai kerangka 3E (Economy, Efficiency, Effectiveness) yang diperluas menjadi value-for-money serta prinsip good governance (akuntabilitas, transparansi, partisipasi). Literatur OECD menempatkan asset management plan sebagai jembatan antara perencanaan strategis jangka panjang, penganggaran modal, dan operasi pemeliharaan; ini krusial untuk menekan biaya siklus hidup dan meningkatkan kinerja layanan.

## **5) Perspektif Internasional: Pembelajaran Kunci**

Studi lintas-negara menunjukkan tantangan umum: inventaris aset yang terfragmentasi, utilisasi rendah, dan pemeliharaan yang tertunda. Reformasi yang berhasil biasanya menggabungkan: (i) register aset yang andal, (ii) valuasi berbasis pasar, (iii)

model pemanfaatan yang transparan (sewa, KPBU, kemitraan komunitas), dan (iv) governance yang jelas antar unit organisasi. Kaganova & McKellar menyoroti pentingnya kejelasan mandat pengelola, sentralisasi data aset, dan indikator kinerja yang terukur. World Bank menekankan bahwa pengelolaan aset publik yang lebih baik dapat “membawa aset keluar dari bayang-bayang”—menghasilkan layanan yang lebih baik, menambah penerimaan, sekaligus hijau–tangguh–inklusif.

## 6) Metode Evaluasi yang Relevan

Literatur merekomendasikan kombinasi pendekatan kuantitatif–kualitatif:

- Audit kepatuhan & proses terhadap PP 27/2014 jo. PP 28/2020 dan Permendagri 19/2016/7/2024 (cek perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan).
- Penilaian kematangan (maturity) ISO 55001/55002-inspired: kebijakan, tujuan, rencana SAMP, risk-based decision, lifecycle costing, continuous improvement.
- Pengukuran kinerja aset (contoh indikator):
  - Kelengkapan & akurasi register aset (% aset tervalidasi; % aset bersertifikat).
  - Utilisasi (tingkat okupansi/ pemakaian gedung/lahan, jam layanan aset sosial).
  - Kualitas layanan & kondisi (skor kondisi jalan, frekuensi gangguan air, downtime fasilitas).
  - Biaya siklus hidup (O&M per unit layanan; backlog pemeliharaan).
  - Kinerja keuangan (PAD dari pemanfaatan aset; leverage KPBU; nilai wajar vs nilai buku).
  - Kinerja lingkungan & ketahanan (efisiensi energi/air, emisi tahunan aset, adaptasi banjir/panas).

Indikator-indikator ini sejalan dengan praktik OECD dan pedoman PBB untuk rencana manajemen aset yang mengaitkan target layanan–anggaran–risiko.

- Analisis nilai publik: mengaitkan output aset (mis. ruang publik, sekolah, puskesmas) dengan outcome sosial (akses, inklusi, keselamatan) yang berkontribusi pada target SDGs lokal.

## 7) Isu Khas Pemerintah Daerah

Literatur menandai beberapa hambatan yang sering muncul di level kota/kabupaten:

1. Data aset yang tersebar antar OPD, 2) Sertifikasi lahan belum tuntas, 3) Pemeliharaan reaktif bukan preventif, 4) Model pemanfaatan yang belum optimal dan transparan, 5) Keterbatasan kapasitas perencanaan dan valuasi, 6) Integrasi lemah antara Renstra–RKPD–KUA/PPAS dengan rencana aset. Solusi yang direkomendasikan: pembenahan register terpusat, SAMP daerah terintegrasi penganggaran, dan pemetaan opsi pemanfaatan (sewa, BOT, kemitraan sosial) berbasis studi kelayakan dan analisis risiko.

## Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif buat mengevaluasi pengelolaan aset publik di Kota Serang dalam menunjang pembangunan berkepanjangan. Bagi (Asiva Noor Rachmayani, 2015) kualitatif deskriptif merupakan sesuatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang ikut serta. Pendekatan ini diseleksi sebab membolehkan peneliti buat menguasai fenomena secara mendalam, khususnya terpaut pengelolaan aset publik, hambatan yang dialami, dan kesempatan revisi yang bisa diimplementasikan. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer serta sekunder. Dengan metode ini, penelitian diharapkan bisa menciptakan analisis yang komprehensif mengenai keadaan pengelolaan aset publik di Kota Serang, tercantum mengenali strategi yang bisa menunjang pencapaian tujuan pembangunan berkepanjangan.

## Pembahasan

Hasil penelitian ini mengatakan kalau pengelolaan aset publik di Kota Serang masih mengalami beberapa tantangan yang membatasi upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama yang ditemui merupakan minimnya sistem pendataan aset yang terintegrasi serta akurat. Banyak aset publik yang tidak tercatat

secara sistematis, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam merancang pemeliharaan ataupun pemanfaatannya secara efektif. Bagi (Damayanti et al., 2024) Pemerintah wajib membenarkan kalau manajemen resiko diterapkan secara baik serta efisien di seluruh instansi pemerintah. Perihal ini buat membenarkan kalau tata kelola pemerintahan sudah dicoba secara maksimal dengan pencapaian tujuan yang mempunyai tingkatan efisiensi serta daya guna tinggi. Informasi yang tidak lengkap ataupun tidak terbaru pula membatasi pengambilan keputusan yang pas dalam pemakaian aset buat menunjang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Tetapi disisi lain partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset publik di Kota Serang pula masih sedikit. Warga lebih banyak berfungsi selaku penerima manfaat daripada jadi mitra aktif dalam proses perencanaan serta pengelolaan aset. Perihal ini menampilkan terdapatnya kesenjangan komunikasi antara pemerintah daerah serta warga. Sementara itu, partisipasi warga sangat berarti buat membenarkan kalau pemanfaatan aset publik cocok dengan kebutuhan lokal serta bisa tingkatkan rasa mempunyai terhadap aset tersebut. Serta dengan kondisi warga yang bermacam- macam ini membolehkan untuk terjadinya konflik serta pula kesenjangan sosial yang tinggi (Hamdan, 2022)

Berikutnya, pada permasalahan pemeliharaan aset pula jadi hambatan utama. Aset yang terdapat, semacam gedung, sarana umum, serta infrastruktur, tidak selalu dipelihara dengan baik, sehingga kondisinya memburuk serta pengaruhi mutu pelayanan publik. Kerusakan pada aset- aset tersebut menaikkan anggaran perbaikan yang sepatutnya bisa dihindari dengan pemeliharaan yang teratur serta terencana. Perihal ini pula berakibat pada daya guna pemakaian aset dalam jangka panjang, sebab aset yang tidak terpelihara cenderung jadi kurang produktif serta tidak membagikan manfaat optimal untuk warga. Sehingga terdapat sesi dimana segala kebutuhan aset wajib diidentifikasi tercantum kebutuhan pemeliharaan aset buat setelah itu disusun dokumen perencanaannya, serta perencanaan kebutuhan yang sudah disetujui dituangkan ke dalam dokumen penganggaran, sehabis itu sesi perencanaan ialah ialah sesi yang sangat krusial sebab memastikan penerapan tahap- tahap dalam siklus hidup aset yang lain (Hilmi et al., 2018). Sehingga dari itu pentingnya manajemen aset secara tepat serta bermanfaat, dengan

berlandaskan prinsip pengelolaan yang efektif serta efisien, diharapkan hendak berikan kekuatan terhadap keterampilan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan daerahnya yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah ( PAD), (Aira, 2014). Namun koordinasi antarinstansi yang ikut serta dalam pengelolaan aset publik di Kota Serang pula ditemui belum maksimal. Walaupun terdapat kebijakan yang mengendalikan pengelolaan aset, penerapannya masih terhambat oleh minimnya komunikasi yang baik antara bermacam pihak yang terkait. Pemerintah daerah, lembaga pengelola aset, serta lembaga yang lain butuh bekerja sama lebih erat guna menentukan pengelolaan yang efektif serta efisien. Tanpa koordinasi yang solid, pengelolaan aset hendak terfragmentasi serta tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang di impikan. Serta Menurut (Darmawan et al., 2022) Kinerja sesuatu Lembaga pemerintah ialah perwujudan kewajiban sesuatu lembaga pemerintah buat mempertanggungjawabkan keberhasilan serta kegagalan penerapan visi serta misi sesuatu organisasi dalam menggapai sasaran serta tujuan yang sudah diresmikan lewat sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hingga berartinya pengelolaan aset daerah yang baik merupakan guna mengoptimalkan manfaat serta nilai ekonomi dari aset tersebut, dan menunjang pelayanan publik serta pembangunan daerah secara efisien (Simbolon et al., 2023)

Tetapi, walaupun terdapat tantangan- tantangan tersebut, Perihal ini pula menciptakan kalau ada kesempatan besar buat tingkatkan pengelolaan aset publik. Salah satunya merupakan dengan menggunakan teknologi dalam pengelolaan aset. Pemakaian sistem manajemen aset berbasis teknologi data hendak membolehkan pengelolaan yang lebih terorganisir, terintegrasi, serta transparan. Sistem ini bisa memudahkan pencatatan aset, memonitor kondisinya, dan merancang pemeliharaan ataupun pemanfaatan aset secara lebih akurat serta efektif. Bagi (Pangestu & Anggraini, 2022) Pergantian era yang terus menjadi canggih ini dalam perihal perubahan mengarah pemerintahan yang berbasis elektronik ataupun e- government itu bukanlah gampang sebab butuh melaksanakan sebagian perihal semacam pengembangan sarana dan prasarana teknologi data serta komunikasi, tugas pemerintah yang berbasis elektronik, pembuatan ciri budaya, serta pengembangan pelaksanaan elektronik government. Dalam mengalami permasalahan

teknologi serta keberlanjutan, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, akademisi, serta warga buat menghasilkan solusi yang berkelanjutan serta inklusif. Maka dari itu menurut (Sucitra et al., 2024) butuh di adakannya kenaikan pendanaan dalam sarana dan prasarana teknologi, training terpaut teknologi, dan regulasi yang menunjang inovasi serta keberlanjutan jadi kunci dalam menanggulangi permasalahan ini Menurut (Fernanda et al., 2023) Secara ekonomi, pembangunan berkelanjutan menekankan perkembangan inklusif serta berkelanjutan dengan distribusi manfaat yang adil. Aspek sosialnya mencakup kenaikan kesejahteraan, akses yang adil terhadap pembelajaran, kesehatan, serta infrastruktur, dan promosi kesetaraan gender. Dalam perihal pengelolaan aset berkelanjutan, berarti pula buat memperhatikan keterlibatan warga. Warga yang lebih ikut serta dalam pengawasan serta pemanfaatan aset akan mendorong terciptanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan. Pelibatan warga dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset publik pula akan menguatkan ikatan antara pemerintah serta masyarakat, dan mendorong pemakaian aset yang lebih produktif serta berguna untuk warga luas. Sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan aset, pemerintah Kota Serang butuh menguatkan kebijakan serta regulasi yang mengendalikan pengelolaan aset publik. Regulasi yang jelas serta terperinci hendak membagikan panduan yang lebih baik untuk lembaga terpaut dalam mengelola aset, dan meminimalkan terbentuknya kesalahan dalam pengelolaan. Pemerintah pula butuh membenarkan kalau kebijakan yang diterapkan menunjang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, ataupun daerah. Pembangunan berkelanjutan sendiri mewajibkan terdapatnya penyeimbang antara perkembangan ekonomi, pelestarian daerah, serta pemerataan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, pemanfaatan lahan tidak produktif tidak cuma berfokus pada kenaikan produktivitas ekonomi, namun pula wajib mencermati akibat area serta membenarkan kalau manfaatnya bisa dialami oleh segala susunan warga (Beno et al., 2022).

Salah satu aspek yang ikut berfungsi berarti dalam keberhasilan pengelolaan aset merupakan penataan anggaran yang mencukupi. Disaat ini, pengalokasian anggaran guna pengelolaan aset di Kota Serang dinilai masih terbatas, sehingga membatasi optimalisasi

pemeliharaan serta pengembangan aset yang terdapat. Secara totalitas serupa akibat korupsi terhadap pembangunan ekonomi sangat merugikan, membatasi kemampuan perkembangan, kurangi investasi, serta mengganggu keberlanjutan zona bisnis. Dimana keberlanjutan perkembangan ekonomi sesuatu negeri sangat bergantung pada investasi baik dari dalam ataupun luar negara. Tetapi, kala korupsi menggila, investor cenderung tidak berminat buat menanamkan modalnya sebab terdapatnya ketidakpastian hukum, resiko bisnis yang besar, serta mungkin terdapatnya pungutan liar yang merugikan. Dampaknya, penyusutan investasi bisa membatasi pertumbuhan sektor- sektor ekonomi yang sepatutnya jadi tulang punggung perkembangan (Fernanda et al., 2023). Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan serta terencana butuh dipertimbangkan. Pemerintah Kota Serang butuh mengevaluasi kembali struktur anggaran buat membenarkan kalau pengelolaan peninggalan jadi prioritas, dan menunjang bermacam program pembangunan yang berkepanjangan. Sehingga optimalisasi sumber pendanaan, tercantum dana hibah serta dorongan dari pemerintah pusat, dan pemanfaatan retribusi serta pajak wilayah, hendak jadi kunci utama dalam mendanai proyek- proyek pembangunan keberlanjutan (Pendapatan et al., 2024).

Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan serta terencana butuh dipertimbangkan. Pemerintah Kota Serang butuh mengevaluasi kembali struktur anggaran buat membenarkan kalau pengelolaan peninggalan jadi prioritas, dan menunjang bermacam program pembangunan yang berkepanjangan. Sehingga optimalisasi sumber pendanaan, tercantum dana hibah serta dorongan dari pemerintah pusat, dan pemanfaatan retribusi serta pajak wilayah, hendak jadi kunci utama dalam mendanai proyek- proyek pembangunan keberlanjutan (Pendapatan et al., 2024).

Perihal ini menunjukkan bahwa walaupun pengelolaan aset publik di Kota Serang mengalami bermacam tantangan, masih banyak kesempatan untuk meningkatkan pengelolaannya guna menunjang pembangunan berkelanjutan. Dengan pelaksanaan sistem manajemen yang lebih modern, pemeliharaan yang terencana, dan kenaikan koordinasi antarinstansi serta partisipasi warga, Kota Serang mempunyai kemampuan besar untuk mengelola aset publik secara lebih efisien serta efektif, yang pada gilirannya

hendak menunjang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu perihal ini pula menyoroti pentingnya kedudukan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan aset publik yang lebih efektif. Pengelolaan aset yang tidak cuma berbasis pada kepemilikan, namun pula pada aspek pemanfaatan yang optimal, jadi krusial dalam menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek berarti yang butuh dicermati merupakan perencanaan jangka panjang yang mengaitkan analisis proyeksi kebutuhan warga serta pertumbuhan kota. Dengan demikian, aset yang ada bisa dimanfaatkan sebaik- baiknya untuk menunjang aktivitas yang berikan dampak positif dalam bermacam sektor, seperti ekonomi, pembelajaran, kesehatan, serta daerah..

Tidak kalah pentingnya, pengelolaan aset publik yang berkelanjutan pula wajib mencakup aspek sosial serta inklusif. Aset publik bukan cuma untuk kepentingan pemerintahan, namun wajib bisa dialami manfaatnya oleh segala susunan warga. Oleh sebab itu, keberadaan ruang terbuka hijau, sarana umum, serta infrastruktur yang lain wajib didorong untuk dapat membagikan akses yang setara bagi segala warga. Salah satu metode untuk mencapainya yaitu dengan mengaitkan warga dalam proses perencanaan serta pengelolaan aset, serta pemberdayaan masyarakat yang mencakup bermacam aktivitas, semacam pelatihan keahlian, pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan jejaring sosial antar- masyarakat. Tujuannya yaitu terwujudnya pemerintahan wilayah yang mempunyai kapasitas yang berkelanjutan( sustainable) dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga peningkatan kesejahteraan warga bisa dicapai secara efisien serta efektif .Tetapi Dengan melibatkan warga secara aktif, program ini membuka kesempatan untuk inovasi, kerja sama, serta kreativitas dalam memaksimalkan kemampuan lokal guna menggapai pembangunan berkelanjutan (Bisnis et al., 2023). Sehingga kepentingan serta kebutuhan mereka bisa tercermin dalam kebijakan pengelolaan aset yang diambil oleh pemerintah.

Serta pemakaian teknologi, mempunyai kemampuan besar buat tingkatan efisiensi pengelolaan aset publik dengan menggunakan sistem data geografis( SIG) serta aplikasi berbasis informasi. Teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pemantauan secara lebih akurat terhadap keadaan fisik aset dan tingkatan transparansi

dalam proses pengelolaannya. Dengan terdapatnya informasi yang lebih baik serta akses yang gampang, pemerintah hendak lebih gampang dalam merancang pemeliharaan, alokasi anggaran, dan merumuskan kebijakan yang lebih pas sasaran. Melalui pelaksanaan kebijakan yang berbasis informasi, pengelolaan aset hendak lebih terstruktur serta cocok dengan kebutuhan jangka panjang. Bagi (Aziz et al., 2021) Berbagai fungsi serta aktivitas yang tumbuh di Kota Serang diwujudkan dengan terdapatnya sarana, prasarana serta fasilitas pendukung aktivitas warga, mulai skala lingkungan sampai skala regional. Di samping itu, pemanfaatan aset buat program- program pembangunan yang berkelanjutan pula jadi kunci utama. Misalnya, pengelolaan tanah kepunyaan pemerintah bisa ditunjukkan untuk proyek pembangunan yang ramah lingkungan ataupun bisa digunakan untuk program- program sosial yang bisa tingkatkan mutu hidup warga, semacam penyediaan ruang publik, rumah susun, ataupun pusat pembelajaran serta kesehatan.

## **Kesimpulan**

Pengelolaan aset publik di Kota Serang memainkan kedudukan yang sangat berarti dalam menunjang pencapaian pembangunan berkelanjutan. Bersumber pada hasil penelitian ini, bisa disimpulkan kalau pengelolaan aset publik di Kota Serang masih mengalami bermacam tantangan yang menghambat efektivitas serta efisiensinya. Minimnya sistem pendataan yang terintegrasi, pemeliharaan yang tidak maksimal, serta koordinasi antarinstansi yang lemah jadi beberapa permasalahan utama yang butuh segera ditangani. Walaupun demikian, penelitian ini pula menampilkan kalau terdapat kesempatan besar buat tingkatkan pengelolaan aset publik, paling utama dengan pelaksanaan teknologi informasi buat mencatat serta memantau aset secara lebih akurat serta efektif.

Tidak hanya itu, pengelolaan aset publik wajib dicoba dengan mencermati prinsip pembangunan berkelanjutan, yang tidak cuma mencakup aspek ekonomi, namun pula sosial serta lingkungan. Pemeliharaan serta pemanfaatan aset yang pas bisa menciptakan manfaat jangka panjang yang tidak cuma menguntungkan pemerintah daerah, namun pula

masyarakat secara totalitas. Oleh sebab itu, berarti untuk pemerintah Kota Serang buat memperkuat kebijakan serta regulasi pengelolaan aset yang menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan, dan menguatkan koordinasi antarinstansi yang ikut serta.

Pelibatan warga dalam pengelolaan serta pengawasan aset publik pula ialah langkah berarti buat membenarkan transparansi serta akuntabilitas dalam pemakaian aset yang dipunyai. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terpaut, serta warga, pengelolaan aset bisa dicoba secara lebih efisien, efektif, serta berakibat positif untuk kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Secara totalitas, pengelolaan aset publik yang baik di Kota Serang bisa jadi pilar berarti dalam menghasilkan pembangunan berkelanjutan, yang tidak cuma mendesak perkembangan ekonomi, namun pula melindungi keseimbangan sosial serta area buat kepentingan generasi mendatang.

#### Daftar Pustaka

- Aira, A. (2014). Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Social Keagamaan, Vol.17*, 21–39.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No Analisis struktur kovarians indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah, dengan fokus pada kesehatan subjektif. Judul. 6*
- Aziz, R., Suherman, S., & Mirajiani, M. (2021). Analisis Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa, 3(2)*, 339–350. <https://doi.org/10.33512/jipt.v3i2.13740>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). No Analisis struktur kovarians indikator terkait kesehatan yang berfokus pada kesehatan subjektif pada lansia yang tinggal di rumah. Judul. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Bisnis, M., Akuntansi, D., Dwiyantri, A., & Dessyarti, R. S. (2023). *Seminar Inovasi. September.*
- Damayanti, R. A., Alam, A. I. A., & ... (2024). Peningkatan Kualitas Aparat Kecamatan Bungoro dalam Memetakan Risiko Guna Mendorong Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *CARADDE: Jurnal ...*, 7, 417–427. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde/article/view/2060%0Ahttps://jou>

rnal.ilinstitute.com/index.php/caradde/article/download/2060/808

- Darmawan, D., Yazid, H., & Bastian, E. (2022). Peran Karakteristik Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(2), 22–35. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i2.191>
- Fernanda, A., Yazid, M. F., Tri, D., & Silitonga, S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Ade. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(November), 77–82.
- Hamdan, H. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Dan Literasi Keuangan Keluarga Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Mandiri. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 4223–4230. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i3.2487>
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *No Analisis struktur kovarians indikator terkait kesehatan, dengan fokus pada kesehatan subjektif, pada lansia yang tinggal di rumah. Judul*. 3(2), 91–102.
- Pangestu, D. K., & Anggraini, W. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Kota Cerdas (Smart City) Melalui Smart Government Di Kota Serang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(2), 130–141. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i2.660>
- Pendapatan, P., Daerah, A., Di, P. A. D., & Sibolga, K. (2024). *Regional tax management strategy in an effort to increase regional original income (pad) in the city of sibolga*. 7.
- Rustam, Jalaluddin, M., Sulistioadi, Y. B., Tursina, N., & Nurhasanah, S. (2023). Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Samarinda Sebagai Bahan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hijau. *ABDIKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman*, 2(1), 34–49. <https://doi.org/10.32522/abdiku.v2i1.482>
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Simbolon, T. R., Hukom, A., Adila, F., Sutrisno, I., Lesdiana, A., Fransiska, N., & Priskila, E. (2023). Strategi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemda Kotawaringin Barat. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2023(1), 345–353. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>

- Sonia, G., & Handrian, E. (2023). ... Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama Kemiskinan Di .... *Yudabbiru Jurnal Administrasi ...*, 1(1), 708–728.  
<https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU/article/view/3298>
- Sucitra, I. D., Pratiknjo, M. H., & Kawung, E. J. (2024). GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Sudarta. (2022). *Pengelolaan Aset Daerah Dalam Perekonoin Banten* (Vol. 16, Issue 1).